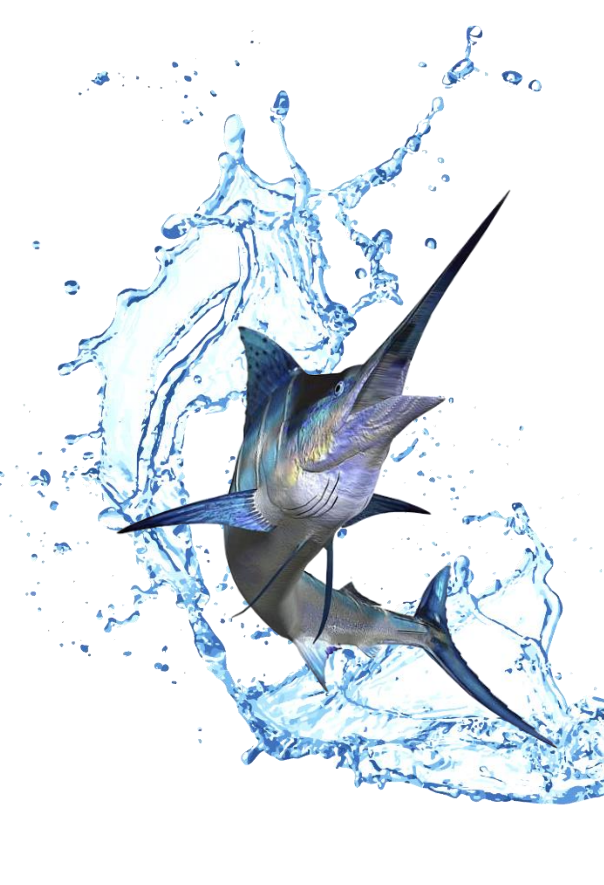
A group of fishermen in a wooden boat on the ocean. The boat is filled with people, some are using long poles to navigate. The water is a deep blue, and the sky is clear with some clouds. The overall scene is one of active maritime work.

Melampaui Jargon Kebijakan “Ekonomi Biru”: Mewujudkan Keadilan, Keberlanjutan dan Transparansi dalam Tata Kelola Kebijakan Kelautan dan Perikanan ASEAN

Transparency International Indonesia (TII) & Pusat Studi Agraria - IPB University

A large fish, possibly a tuna, is shown in mid-air, leaping out of the water. The fish is silver and has a long, pointed snout. The water around it is splashing, creating a dynamic and energetic scene.

Genderang Ekonomi Biru di ASEAN telah ditabuh melalui Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 yang telah terselenggara di Belitung 2-4 Juli 2023 lalu. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia dengan dukungan dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan dihadiri oleh perwakilan negara ASEAN. Namun apakah benar semangat ekonomi biru hadir demi mengakomodir kepentingan alternatif pertumbuhan ekonomi semata? Jika memang demikian arahnya, tentu tak ada ubahnya sebagai praktik pengerukan laut untuk pertumbuhan ekonomi, setelah kerusakan sumber daya di daratan. Apakah demikian artikulasi ekonomi biru?



Tantangan lain juga terlihat bahwa hampir seluruh negara kawasan ASEAN masih terkendala oleh tantangan tata kelola yang signifikan yang mempengaruhi kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi dan kredibilitas upaya anti korupsi mereka. Badan-badan khusus anti korupsi telah dibentuk di seluruh wilayah, namun mereka kurang memiliki independensi, sumber daya, dan visibilitas untuk memberantas korupsi secara efektif. Suap untuk mengakses layanan publik telah menurun secara signifikan, namun korupsi birokrasi masih menjadi tantangan karena sektor publik yang sangat terpolitisasi serta tingginya tingkat nepotisme dan favoritisme¹.

Ketiadaan isu anti korupsi dalam pembahasan ASEAN terlihat nir-kepemimpinan dari Pemerintah Indonesia, terutama di dalam isu anti korupsi². Jika komitmen anti korupsi tidak diulas secara mendasar, tentu praktik seperti ***Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing*** yang telah banyak merugikan negara juga akan luput dari upaya mendorong Kebijakan Ekonomi Biru di ASEAN³. Selain keengganan negara-negara ASEAN untuk memasukkan perspektif antikorupsi ke dalam kerangka ekonomi biru, investasi infrastruktur di ASEAN juga berpotensi tercoreng oleh korupsi dan rentan terhadap jebakan utang. Hasil konsultasi pembangunan ERIA dalam mendorong desain "konektivitas", "koridor ekonomi", atau "layanan desain peta jalan infrastruktur" dalam dokumen *The Comprehensive Asia Development Plan (CADP)*, tak jarang ditangkap Tiongkok dalam desain yang hampir sama melalui *One Belt One Road (OBOR)*. Proyek infrastruktur desain OBOR di bawah "Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRICS)" Tiongkok sering dikritik karena kurangnya transparansi dan membiarkan praktik korupsi⁴.

¹ https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Corruption-in-ASEAN-2020_GCB-launch.pdf

² Tidak ada pernyataan mengenai konsensus atau komitmen anti korupsi di dalam dokumen ASEAN Chairman's Statement of the 42nd ASEAN Summit Labuan Bajo, Indonesia.

³ <https://www.eria.org/news-and-views/asean-blue-economy-forum-2023-harnessing-blue-potential-for-sustainable-development/>

⁴ <https://www.csis.org/analysis/corruption-flows-along-chinas-belt-and-road>

Meluruskan Paradigma Ekonomi Biru bukan semata Jargon Kebijakan di ASEAN

Ekonomi Biru adalah sebuah konsep ekonomi yang mencoba untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip alami dan lokal. Konsep ini dikembangkan oleh Gunter Pauli pada tahun 2010 melalui bukunya berjudul *"Blue Economy-10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs"*. Pauli (2010) menguraikan perbedaan cara pandang dan bekerjanya *red*, *green* dan *blue economy*. **Ekonomi merah** yang sebelum dominan menjadi cara pandang ekonomi manusia dengan pandangan antroposentris dan berfokus pada eksploitasi sumber daya tanpa pertimbangan hubungan timbal balik kepada alam, dinilai sebagai penyebab kebangkrutan, krisis, dan kerusakan dunia saat ini. Sebaliknya, **ekonomi hijau** membutuhkan investasi lebih banyak dari perusahaan dan pembayaran lebih tinggi dari konsumen untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan, namun terkadang sulit diimplementasikan pada masa krisis dan dirasa mahal serta eksklusif. Meskipun upaya perlindungan lingkungan dari ekonomi hijau berusaha melakukan upaya terpuji, tetapi tidak dapat menjamin keberlanjutan.

Gambar 1 Perbedaan mendasar mengenai *red economy*, *green economy* dan *blue economy*



Diolah dari Gunter Pauli dalam laman <https://www.theblueeconomy.org>

Ekonomi biru hadir berbeda dari ekonomi merah dan hijau. Perbedaan yang paling mendasar dapat terlihat dari bagaimana konsep ekonomi merah fokus pada pengambilan sumber daya alam dan menghabisi lingkungan; ekonomi hijau yang memusatkan perhatiannya pada energi alternatif dan lingkungan yang berkelanjutan namun mahal dan eksklusif. Gunter Pauli menyatakan bahwa konsep ekonomi biru, lebih maju dari gagasan merah dan ekonomi hijau karena sepenuhnya ekonomi biru bersifat lebih ramah lingkungan dan bertujuan untuk mentransformasikan sistem ekonomi secara menyeluruh. Menurut tesis ini, bekerjanya konsep ekonomi biru akan menciptakan kesempatan kerja di masa datang, makin meluasnya modal sosial, serta ekonomi dan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang berkelanjutan. Awal mula ekonomi biru bukan sekedar membahas pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Konsep ini pada mulanya lebih menyoroti pentingnya transisi sumber energi bersih terbarukan, serta menciptakan alternatif ekonomi yang adil dan berkelanjutan secara keseluruhan.

Secara definisi, Gunter Pauli dengan tegas menyampaikan "Definisi ini (ekonomi biru) memperjelas bahwa ekonomi biru harus menghormati integritas ekosistem, dan satu-satunya jalan yang aman untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang adalah melalui pengembangan ekonomi sirkuler". Ekonomi biru mengambil inspirasi dari alam dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dalam kesatuan **ekosistem** alami dengan upaya **regeneratif** sehingga sumber daya tetap terjaga dalam **kelimpahan**. Ekonomi biru menciptakan nilai tambah melalui keterlibatan aktif dalam siklus alami sumber daya yang terhubung sebagai **simbiosis**. Contohnya, limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang bernilai dan diubah menjadi produk atau layanan yang memberikan manfaat kembali bagi masyarakat.

Tujuan utama Ekonomi Biru adalah untuk memperkuat sistem ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (**otonomi**), menekan dampak negatif terhadap lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Artinya jika benar ekonomi biru di dorong dalam praktik pemanfaatan tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan di ASEAN, tentu titik tekan pada tumbuhnya subyek ekonomi adalah kemakmuran masyarakat lokal sekitar kawasan tersebut sebagai fokus utamanya. Desain kebijakan adalah mendorong praktik pemanfaatan ekonomi yang memulihkan ekosistem laut. Ekonomi biru bukan sekedar jargon politik kebijakan semata. Namun peluang bagi Para pemimpin ASEAN untuk mendorong praktik baru dalam bisnis kelautan dan perikanan yang lebih inklusif seperti mendorong keterhubungan produsen masyarakat lokal dan swasta yang adil dan setara. Selain itu juga mendorong distribusi sumber daya yang terjaga kelimpahannya, bukan sekedar ekstraksi laut demi kebutuhan mendorong mesin pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Ekonomi Biru Menjawab Masalah (Si)Apa di ASEAN?

Berdasar ulasan sebelumnya telah diulas secara mendasar semangat ideal dari ekonomi biru, namun pada praktiknya narasi ekonomi biru yang sedang diusung oleh para pemimpin ASEAN perlu dihadapkan dengan realita masalah dan tantangan yang sedang dihadapi negara-negara kawasan ASEAN tersebut. Pada bagian ini akan dibahas perihal tersebut, sehingga dapat dilihat *gap* masalah kebijakan dan motif desain kebijakan yang sedang digaungkan:

1. Jebakan konsultansi proyek Infrastruktur dalam Ekonomi Biru

Krisis dan pergeseran geografi produksi mendorong desain induk pembangunan yang dijalankan oleh negara-negara Asia Timur untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik. Sejak krisis 2008, upaya membangun kekuatan ekonomi regional telah dimulai, sebagaimana tercermin dalam dorongan untuk membangun regionalisme ekonomi sejak krisis 1997. Kalimat "*There Is No Alternative: Regionalism*" oleh mantan Sekjen ASEAN 1998 - 2002, Rodolfo C. Severino Jr., mencerminkan semangat ini, mengaitkan masa krisis Asia. Dokumen *Comprehensive Asia Development Plan* (CADP) lahir pada 2010 melalui lembaga ERIA (*Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*), yang mulai terbentuk pada 2006 oleh intelektual dari 16 negara Asia. Dokumen ini mengarah pada pembentukan pasar bebas Asia dengan menggabungkan peluang dari krisis 2008 dan ambisi memperkuat kekuatan ekonomi dan politik di wilayah tersebut.

Pada 1 April 2007, pertemuan di Manila menyepakati tujuan ERIA, termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperdalam integrasi ekonomi di Asia Timur. ERIA diberi mandat pada Agustus 2007 untuk menyusun dokumen integrasi ekonomi Asia Timur. ERIA didirikan pada November 2007 dan terakomodasi dalam struktur Sekretariat ASEAN. CADP, yang diterbitkan pada 2009 dengan dukungan jaringan lembaga penelitian, berusaha menciptakan desain induk pembangunan infrastruktur di Asia Timur sebagai "*Asian Marshall Plan*" untuk membangun kembali ekonomi dunia kapitalis yang terkena dampak krisis, dengan Asia menjadi penggerak ekonomi global. Gagasan inti CADP adalah Konektivitas Asia, dengan pemencaran produksi dan pembangunan infrastruktur sebagai penghubung berbagai sentra produksi. Tujuannya adalah mewujudkan Asia sebagai Pabrik Dunia melalui pembentukan klaster ekonomi dan sentra industri di berbagai negara. Dukungan ERIA dalam desain ekonomi biru berpotensi mendorong *service link* proyek infrastruktur di ASEAN yang mendukung bisnis perikanan dan kelautan skala besar, dan hanya akan mendorong proses ekstraksi sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin masif. Hal tersebut sangat bertentangan dengan praktik dan semangat dari ekonomi biru *ala* Gunter Pauli. Kebutuhan infrastruktur harus mendukung kebutuhan lokalitas subyek pesisir dan meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi pada kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil di negara kawasan ASEAN.

2. Subyek dominan perikanan di Asia Tenggara adalah *Small-Scale Fisheries* (SSF)

Jika desain kebijakan kelautan dan perikanan di ASEAN ditujukan untuk pengembangan industri skala besar, maka bukan disebut sebagai praktik ekonomi biru. Dalam realitanya penangkapan ikan skala kecil mendominasi perikanan di Asia Tenggara, baik di perairan pesisir maupun perairan pedalaman. Perikanan skala kecil dan budidaya perairan mempunyai potensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di Asia Tenggara. Namun, mereka menghadapi degradasi habitat dan penipisan sumber daya, kemiskinan, dan terbatasnya akses terhadap produk dan jasa pasar dan keuangan, serta infrastruktur publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan komunikasi⁵. Pada tahun 2013–2017, tangkapan tahunan dan jumlah orang yang bekerja di perikanan skala kecil di daratan kawasan ASEAN rata-rata masing-masing sekitar 2,5 juta ton dan 1 juta orang⁶.



⁵ <https://repository.seafdec.org/handle/20.500.12066/7118>

⁶ FAO. (2022). *International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022: Global Action Plan*.

3. *IUU-Fishing* dan Kerugian Negara

Pada tahun 2019, negara-negara ASEAN menderita kerugian ekonomi melebihi \$6 miliar akibat *IUU Fishing*, dengan Indonesia dan Vietnam mengalami dampak terbesar⁷. Indonesia, negara yang memiliki wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terluas, mengalami potensi kerugian sekitar \$6,8 miliar pada 2015 dan total mencapai \$201 miliar antara 2013 dan 2018⁸. Angka ini kemudian menurun menjadi \$74 juta pada tahun 2021. Kerugian ini sejalan dengan estimasi potensi tangkapan ikan ilegal, yang dihitung berdasarkan jumlah dan tonase perkiraan kapal penangkap ikan yang terlibat dalam *IUU fishing*. Jumlah kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap oleh pemerintah Indonesia juga menunjukkan penurunan yang signifikan dari 163 kapal pada 2016 menjadi hanya 38 kapal pada 2019⁹. Meskipun jumlahnya meningkat menjadi 167 kapal pada 2021, angka ini masih jauh lebih rendah daripada tahun 2014, di mana terdapat 930 kapal penangkap ikan ilegal yang tertangkap di perairan Indonesia¹⁰.

Dalam dekade terakhir, penangkapan ikan ilegal semakin dianggap sebagai bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir. Ini terjadi karena keterkaitannya dengan kejahatan lain, peningkatan organisasi, dan gabungan dengan tindakan kriminal seperti kerja paksa. Kasus Pusaka Benjina Resources pada 2015 menggambarkan dengan jelas kejahatan perikanan lintas negara. Meskipun perusahaan ini terdaftar di British Virgin Islands, pendanaannya berasal dari Thailand dan perusahaan ini ditemukan menguasai 1.128 awak kapal penangkapan ikan yang diperbudak dari Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos¹¹. Berdasarkan data dari Badan Perikanan Taiwan, terdapat 21.994 nelayan migran asal Indonesia dan 7.330 nelayan Filipina yang bekerja di kapal penangkap ikan Taiwan dalam perjalanan jauh. Selain itu, berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, tercatat 1.451 kasus di mana awak kapal migran Indonesia mengajukan keluhan terkait perbudakan, penganiayaan, kematian, upah yang tidak dibayar, serta praktik yang tidak adil dan ilegal¹².

⁷ Lee, W. C., & Viswanathan, K. K. (2020). Framework for managing illegal, unreported and unregulated fishing in ASEAN. *World, 10000*, 23500.

⁸ <https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>

⁹ <https://money.kompas.com/read/2021/12/13/173905726/kkp-tangkap-167-kapal-pelaku-illegal-fishing-selama-2021?page=all>

¹⁰ <https://m.kominfo.go.id/content/detail/5623/stop-illegal-fishing-jaga-laut-indonesia/0/infografis>

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408165729-95-45142/data-dan-fakta-pusaka-benjina-resources-versi-pemerintah>

¹² <https://www.republika.co.id/berita/qlapb382/kemlu-catat-hingga-1451-kasus-abk-indonesia-di-kapal-asing>



**POTENSI
KERUGIAN
INDONESIA
AKIBAT IUU**

Tahun 2013-2018

US\$ 201 Miliar

Tahun 2015

US\$ 6,8 Miliar

Tahun 2021

US\$ 74 Juta

**JUMLAH KAPAL IKAN ILEGAL
YANG BERHASIL DITANGKAP
OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

930 Kapal pada 2014

163 Kapal pada 2016

38 Kapal pada 2019

167 Kapal pada 2021

4. ASEAN Forum momentum Komitmen Pemberantasan Korupsi Kelautan Perikanan yang Berdampak Buruk bagi Kerusakan Biodiversitas

Korupsi dalam industri perikanan berdampak negatif pada ekosistem laut dan komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut. Negara-negara dengan pemerintahan lemah dan minim pengawasan rentan terhadap korupsi, yang pada gilirannya memicu penangkapan ikan berlebihan dan eksploitasi sumber daya. Terutama di negara berkembang, situasinya sangat kritis karena banyak suplai ikan ke negara maju telah merusak stok ikan di perairan mereka, mendorong armada kapal pukat global untuk memenuhi permintaan makanan laut yang meningkat utamanya melalui praktik *IUU Fishing*. Menurut PBB, konsumsi makanan laut global telah meningkat dua kali lipat dalam lima dekade terakhir, dengan 35% stok ikan dianggap terlalu banyak ditangkap¹³. Banyak negara berkembang pesisir sangat tergantung pada ikan untuk pekerjaan dan pangan. UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) memperingatkan dalam laporan tahun 2019 bahwa kegagalan dalam memerangi korupsi akan membawa dampak finansial, lingkungan, dan sosial yang signifikan¹⁴.

¹³ <https://www.fao.org/3/cc0461en/online/sofia/2022/status-of-fishery-resources.html>

¹⁴ https://www.unodc.org/documents/Rotten_Fish.pdf

Kesimpulan

Ekonomi Biru adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip alami dan lokal. Gunter Pauli mengungkapkan bahwa konsep ini lebih maju daripada ekonomi hijau karena sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan bertujuan untuk mentransformasi sistem ekonomi secara menyeluruh. Konsep ini juga mencakup nilai spiritual dan filosofis yang dalam mengenai penghormatan terhadap lingkungan dan bumi, serta memperkuat subjek dan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Ekonomi biru bukan sekedar jargon politik kebijakan semata. Melalui KTT ASEAN 2023, para pemimpin ASEAN berpeluang mendorong praktik baru dalam bisnis kelautan dan perikanan yang lebih inklusif seperti mendorong keterhubungan produsen masyarakat lokal dan swasta yang adil dan setara. Selain itu juga mendorong distribusi sumber daya yang terjaga kelimpahannya, bukan sekedar ekstraksi laut demi kebutuhan mendorong mesin pertumbuhan ekonomi jangka pendek.



Rekomendasi

Berdasarkan pendalaman secara substansial mengenai ekonomi biru dan realita konteks masalah kebijakan yang perlu dijawab di ASEAN pada pembahasan sebelumnya. Transparency International Indonesia memandang bahwa dorongan Praktik Kebijakan Ekonomi Biru apabila tetap dijalankan oleh pemerintah, maka perlu berjalan pada koridor pemanfaatan dan penatakelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang “adil, berkelanjutan, dan transparan”. Dalam mencapai cita-cita tersebut, TI Indonesia merekomendasikan seperangkat langkah kebijakan yang dapat dijalankan, melalui:

Pertama, Mengutamakan Subjek Utama Pelaku Ekonomi Biru di Kawasan ASEAN yakni Nelayan Kecil, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang jumlahnya mendominasi atau disebut *Small-scale Fisheries*. Pada dasarnya, prinsip ekonomi biru berbasis pemanfaatan sumber daya yang mengakar pada lokalitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya subjek utama pelaku ekonomi biru mengacu pada aktor-aktor lokal seperti nelayan kecil dan tradisional, masyarakat lokal, dan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selama ini, subjek utama pelaku ekonomi biru yang dekat dengan potensi sumber ekonomi justru menjadi pihak-pihak yang terabaikan; hal ini diperkuat dengan data tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir yang bertolak belakang dengan cita-cita ekonomi biru itu sendiri. Pada tahun 2013–2017, tangkapan tahunan dan jumlah orang yang bekerja di perikanan skala kecil di kawasan ASEAN rata-rata masing-masing sekitar 2,5 juta ton dan 1 juta orang. Sementara itu, terdapat lebih dari 4,75 juta orang yang melakukan penangkapan ikan skala kecil di daratan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi mereka pada tahun 2016.



Kedua, Menerapkan pendekatan manajemen sumber daya berbasis masyarakat atau berbasis kearifan lokal karena akan membantu memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pemimpin negara-negara ASEAN perlu mendukung pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat lokal atau berbasis adat untuk mengelola dan memonitor pengelolaan sumber daya laut di wilayah. Selain itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan kecil dan masyarakat lokal mengenai praktik perikanan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, pencegahan dan pelaporan terintegrasi dalam penanganan *IUU Fishing*.

Ketiga, Pemimpin negara ASEAN perlu menguatkan komitmen terhadap pemberantasan *IUU Fishing* dan perlindungan lingkungan laut melalui *Regional Agreements and Commitments* yang mengikat. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi sumber daya laut dan mendorong praktik ekonomi biru di seluruh kawasan ASEAN. Isu keamanan maritim merupakan perhatian berbagai pihak di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dalam konteks ini, potensi timbulnya benturan kepentingan menjadi signifikan karena permasalahan tersebut memerlukan distribusi kewenangan yang adil dan transparan untuk penanganannya. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengembangkan pedoman dan otoritas yang jelas guna memberikan panduan tegas terkait penyelidikan, penangkapan, dan aspek keamanan. Sementara itu, pemangku kepentingan kecil di sektor perikanan skala kecil-menengah perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka menghindari praktik penangkapan ikan ilegal, yang dikenal sebagai *IUU Fishing*. Penerapan sistem pelacakan (*Transparency and Traceability*) dalam rantai pasok perikanan dapat membantu memastikan bahwa ikan yang diekspor dari wilayah ASEAN dipancing secara legal dan berkelanjutan. Langkah ini akan membantu mengatasi masalah *IUU Fishing* dan memastikan produk perikanan yang adil dan transparan.

Keempat, Pemimpin negara kawasan ASEAN dapat memonitoring praktik pembangunan infrastruktur di kawasan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil negara mereka menggunakan *Infrastructure Corruption Risk Assessment Tool* (ICRAT). Hasil monitoring ICRAT diharapkan juga dapat digunakan juga sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah, swasta dan publik luas untuk memperkuat langkah-langkah mitigasi risiko korupsi di sektor infrastruktur sebagai aksi kolektif. Korupsi dalam industri kelautan dan perikanan telah berdampak negatif pada penurunan kualitas ekosistem laut dan perampasan hak-hak komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut. Negara-negara dengan pemerintahan lemah dan kurangnya pengawasan pada praktik-praktik proyek pembangunan khususnya infrastruktur baik swasta dan negara, rentan terhadap praktik korupsi. Pada gilirannya hal tersebut dapat memicu eksploitasi sumber daya berlebih. Sejatinya, *Blue economy* bukan sekedar kedok untuk “menyisipkan” proyek infrastruktur. Namun jika pembangunan infrastruktur tersebut benar dibutuhkan maka harus didasari oleh kebutuhan masyarakat lokal di kawasan, berdasar sumber daya lokal, serta praktik pembangunannya tidak boleh merusak ekosistem kawasan dan biodiversitas.



Transparency International Indonesia (TII) &
Pusat Studi Agraria - IPB University

